



KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah dengan menyusun rencana aksi kinerja sasaran Perangkat Daerah. Rencana aksi atau action plan adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi itu sendiri setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound).

Begitu tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah terutama menghadirkan kembali negara dalam sendi kehidupan masyarakat merupakan tantangan bagi segenap Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan kerja nyata. Untuk menjawab tantangan dimaksud diperlukan perencanaan yang prospektif, realistis, akuntabel dan transparan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dituntut untuk mampu merencanakan kebijakan yang inovatif dan dapat diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi untuk selanjutnya dilakukan monitoring sehingga ada evaluasi untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik.

Dokumen rencana aksi ini hendaknya menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain daripada itu harapannya dokumen rencana aksi ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi ketika mewujudkan dan memformulasikan perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong Seberang, 7 Januari 2025

CAMAT TENGGARONG SEBERANG

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk1

NIP. 19681024 199003 1004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	2
BAB II VISI dan MISI	6
2.1 Visi dan Misi	6
2.2 Tujuan dan Sasaran	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III RENCANA AKSI	22
3.1 Rencana Aksi	22
3.2 Sasaran Strategis	23
3.3 Penganggaran	24
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk mewujudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah dengan menyusun rencana aksi Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja Sasaran. Membuat action plan atau rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Rencana aksi sendiri setidaknya harus memenuhi 5 kriteria SMART. Yakni Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.

Mengapa perlu memenuhi 5 kriteria di atas? Tentunya karena rencana perubahan yang kita buat akan sia-sia tanpa adanya kelima hal tersebut. Bayangkan jika kita harus membuat perubahan atas masalah yang tidak jelas atau tidak spesifik, membuat perubahan atas rencana-rencana tanpa ada tolok ukur keberhasilan yang pasti, membuat perubahan yang sudah nyata-nyata tidak mungkin diubah, membuat perubahan yang imajiner tanpa dilandasi realita sekitar, membuat perubahan tanpa ada batasan waktu atas goal yang ingin kita capai. Jadi kesimpulannya, kelima kriteria di atas akan membantu mengarahkan kita membuat perubahan sosial melalui rencana aksi yang matang sehingga menjadi jelas target apa yang ingin dicapai.

Rencana Aksi sangat penting dibuat di awal karena dari situlah kita dapat menganalisa berbagai hal atau tujuan utama yang menjawab problem statement, objektif, aktivitas, hingga eksekusi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan terkait perubahan yang akan kita lakukan.

Dari Rencana Aksi pula, kita akan memiliki arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan tersebut. Rencana Aksi juga bisa merepresentasikan proses perubahan

yang dinamis, jika diperlukan kita juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa dokumen Rencana Aksi berperan penting untuk mengeksekusi sasaran kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang sehingga dapat **MEWUJUDKAN MASYRAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA.**

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran Kecamatan Tenggarong Seberang, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan unsur Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound.
2. Untuk mensinkronisasikan rencana aksi dengan implementasi kebijakan.
3. Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan pengembangan perekonomian diwilayah Kecamatan.

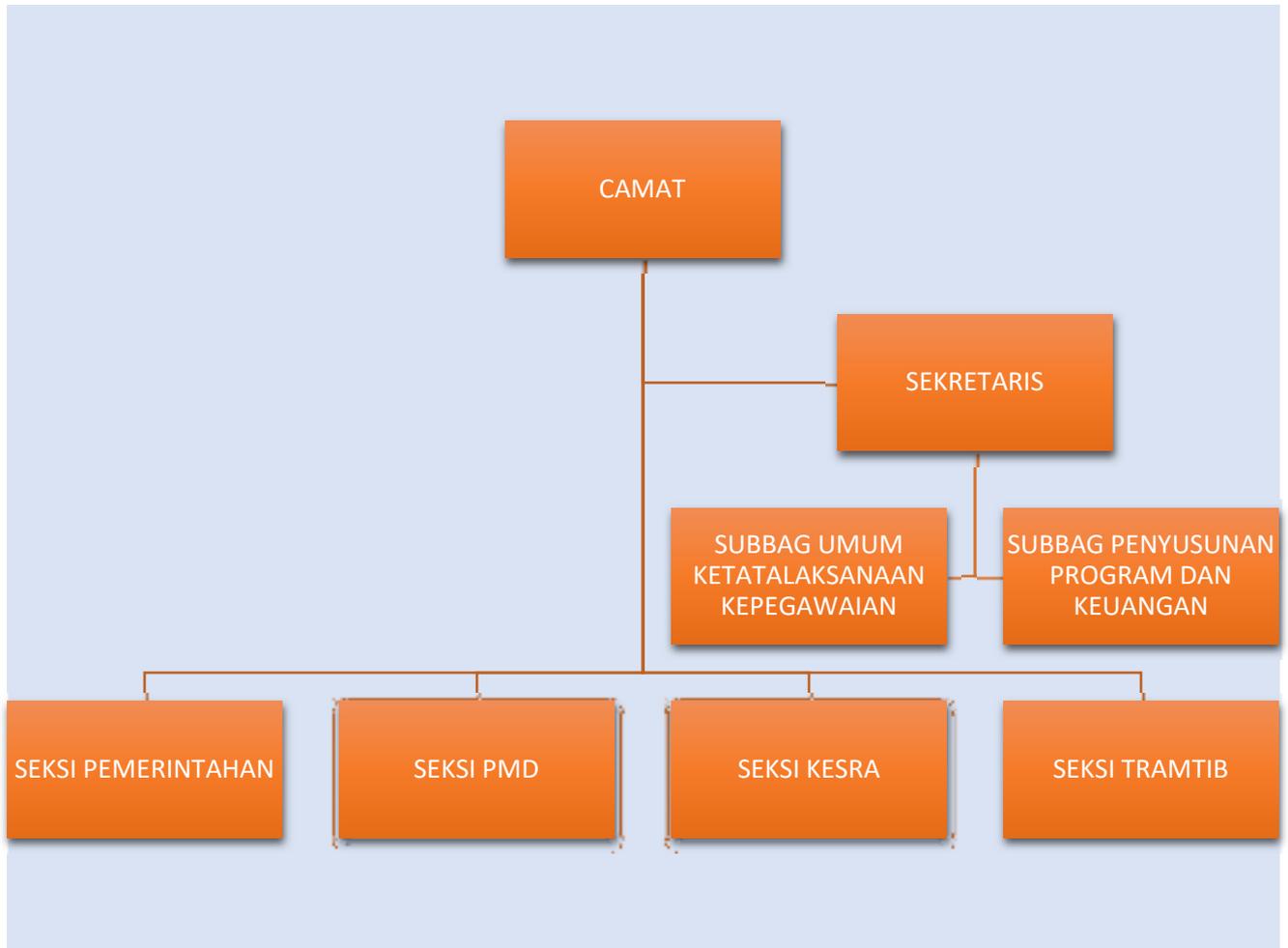
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban diwilayah Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan / atau kelurahan dan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan, fasilitas dan pendorong kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.

Organisasi Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan. Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

Tabel 1
Bagan struktur organisasi



Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Kantor Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Per Desember 2023 adalah sebanyak 56 orang.

Kualifikasi Pendidikan

NO	Pendidikan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	6	2	8
2.	S-1	11	4	15
3.	D-III	-	3	3
4.	SMA/Sederajat	23	5	28
	Jumlah	40	13	53

Pangkat Dan Golongan

NO	Pangkat dan Golongan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Tk I / IV/b	1	-	1
2.	Pembina /IV/a	2	2	4
	Penata Tk. I /III/d	8	2	10
	Penata / III/c	-	-	-
	Penata Muda Tk. I /III/b	5	5	10
	Penata Muda/III/a	5	-	5
	Pengatur Tk. I / II/d	13	4	17
	Pengatur/II/c	5	-	5
	Pengatur Muda Tk. I / II/b	-	-	-
	Pengatur Muda / II/a	1	-	1
	Jumlah	40	13	53

Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat Struktural : 9 orang

Pejabat Fungsional : 44 orang

BAB II

VISI DAN MISI

2.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang, serta guna mendukung agenda prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai kartanegara maka Visi yang hendak dicapai dalam Renstra Perubahan periode 2022–2026 adalah :

“MEWUJUDKAN MASYRAKAT TENGGARONG SEBERANG YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA ,,

Guna mewujudkan visi Kecamatan Tenggarong Seberang 2022-2026 diatas, maka dirumuskanlah Misi Kecamatan Tenggarong Seberang dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah yaitu :

1. MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT

2. MENINGKATNYA KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan OPD.

Rumusan Tujuan Rencana Aksi Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi SKPD
2. Hasil Perumusan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Untuk Selanjutnya Dirumuskan Sasaran Renja Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 Adalah Sebagai Berikut :

Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkantoran Dan Pengelolaan Data Secara Profesional Dan Berbasis Teknologi Informasi;

Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Kewenangan Dan Tupoksi Kecamatan;

Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Secara Komprehensif (Lengkap) Dan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan;

Meningkatkan Semangat Gotong Royong, Swadaya, Prakarsa Dan Inisiasi Masyarakat Dalam Berpartisipasi Membangun Desa Dan Kecamatan ;

Optimalisasi Fungsi Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase/Gorong-Gorong Di Wilayah Kecamatan Dan Desa;

Pembangunan Secara Menyeluruh Menyangkut Konektivitas Antar Wilayah Kecamatan ;

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Renstra 2021 - 2026
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95	95	98	100	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	9	9	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	2
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	85	85	86	100	100
			Tersedianya gaji dan tunjangan	100	100	100	100	100
			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	95	100	100	100	100

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	4	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3	3	3	3	3
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4	4	4	4	4
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	2	2	2
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	100	100
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1	1	1	1	1
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	1	1	1	1	1
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	75	85	85	95	100
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	75	85	95	95	100
			Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	55	60	65	70	75
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	74	74	74	74	74
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	74	74	74	74	74

		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	1	1	1	1	1
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	1	1	1
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4	4	4	4	4
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	3	3	3	3
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	98	98	98	98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	10	10	10	10
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	60	60	60	60
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	43	43	43	43	43
			Jumlah Makanan dan Minuman	960	960	960	960	960
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	175388	175388	175388	175388	175388
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	360	360	360	360	360
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12	12	12	12	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	95	95	95	95	95
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tata Kelola Arsip	80	80	80	80	80

		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1	1	1	1	1
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	1	1	1	1
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	463	463	463	463	463
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	12
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	12	12	12	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	100	100	100	100	100
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10	10	10	10	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10	10	10	10	10
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	1
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	25	25	25	25	25
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	1

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1	1	1	1
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	65	67	67	67	67
			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	1	1	1	1	1
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	95	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100	100	100	100	100
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait	9	9	9	9	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100	100	100
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	18	18	18	18	18
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		85	85	85	85

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			85	85	85	85
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90	90	90	90	100
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	100	100	100	100	100
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	18	18	18	18	18
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	9	9	9	9	9
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat	27	27	27	27	27
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan	18	18	18	18	18

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Tenggarong Seberang 2025 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Perjanjian Kinerja untuk selanjutnya dirumuskan sasaran renstra Kecamatan Tenggarong Seberang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya layanan administrasi perkantoran.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGO YUWONO, S.Sos.,M.Si.

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

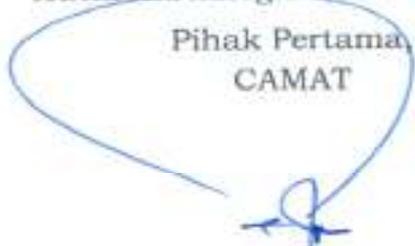
Pihak

kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

<p>Pihak Kedua, BUPATI KUTAI KARTANEGARA</p>  <p><u>Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.</u></p>	<p>Pihak Pertama, CAMAT</p>  <p><u>TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.</u> Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196810241990031004</p>
--	--

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	80
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	80
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1

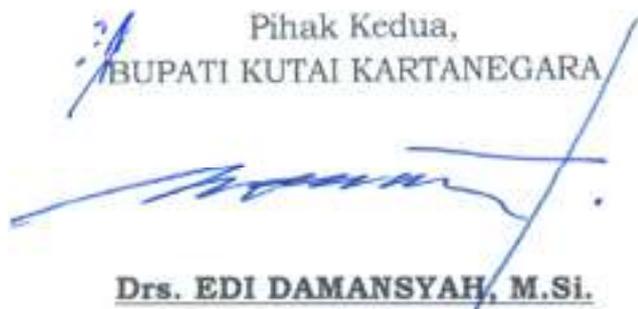
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.11.479.480.699	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.43.455.400.000	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.686.000.000	APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.175.000.000	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.280.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.56.075.880.699	

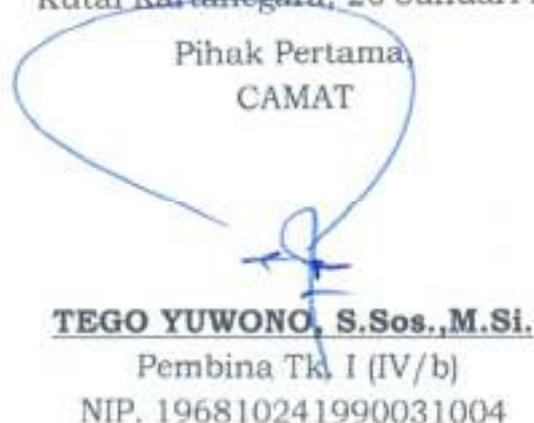
Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
 CAMAT



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 196810241990031004

BAB III RENCANA AKSI

3.1 Rencana Aksi

Untuk mendukung perencanaan kinerja sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2025 tersebut diatas, direncanakan aksi sebagai berikut :

Tabel 4
Rencana Aksi 2025

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran 2. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa 3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum 4. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6. Menunjang urusan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan 3. Meningkatkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4. Meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 5. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

3.2 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan

Tabel 5
Sasaran Strategis 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70 nilai
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100%
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%
2	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 %
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 nilai

3.3 Penganggaran

RENCANA AKSI KINERJA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Progam/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Penanggung Jawab
							TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan yang efektif, efisien, inovatif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98	Nilai	11.479.480.699					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	605.000.000					Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	140.000.000	■	■			Kasubag penyusunan program dan keuangan

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	5.000.000	✓	✓			Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dokumen	5.000.000		✓			Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	70.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	60.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200	Data	300.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Berita Acara	25.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	86	Persen	8.376.268.439					
			Tersedianya gaji dan tunjangan	100	Persen						

			Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100	Persen						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	8.226.268.439	☑	☑	☑	☑	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25.000.000	☑				Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	100.000.000	☑	☑	☑	☑	Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	25.000.000		☑			Kasubag penyusunan program dan keuangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barangmilik daerah pada perangkat daerah	100	persen	265.800.000					
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000	☑	☑	☑	☑	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	150.000.000		☑			Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian

		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000						Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	40.800.000						Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	85	Persen	161.000.000						
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang dilaksanakan	85	Persen							
			Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dilaksanakan	60	Persen							
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66	Paket	114.000.000						Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Dokumen	4.000.000						Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	4.000.000						Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian

		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Sistem Informasi kepegawaian yang dilaksanakan	1	Dokumen	4.000.000		✓			Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3	Orang	20.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	15.000.000		✓			Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98	Persen	745.256.260					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	29.413.760	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	85.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	100.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	70.155.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan	2	Paket	3.600.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12	Laporan	50.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	307.087.500	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	Dokumen	50.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	50.000.000	✓				Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang Milik Daerah	100	persen	180.000.000					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	180.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	711.156.000					

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.100.000	✓					Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	336.056.000	✓	✓	✓	✓		Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan Kantor	12	Laporan	20.000.000	✓	✓	✓	✓		Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	350.000.000	✓	✓	✓	✓		Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	100	Persen	435.000.000						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	10	Unit	10.000.000	✓	✓	✓	✓		Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	10	Unit	125.000.000	✓	✓	✓	✓		Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian

		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16	Unit	25.000.000					Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	25.000.000					Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	150.000.000					Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	100.000.000					Kasubag umum dan ketatalaksanaan kepegawaian
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase pelayanan perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	67	Persen	43.455.400.000					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	4	Kegiatan	400.000.000					

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2	Laporan	150.000.000						Kasi Kesra
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	250.000.000						Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	4	Kegiatan	100.000.000						
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	100.000.000						Kasi PMD
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terkelolanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	42.955.400.000						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	2	Laporan	746.900.000						Kasi Pelum
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	226	Laporan	42.208.500.000						Kasi PMD

	Meningkatnya Persentase jumlah desa Mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat Desa /Kelurahan yang Aktif	100	Persen	686.000.000					
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan	100	Persen	200.000.000					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan	8	Lembaga kemasyarakatan	150.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasi PMD
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19	Laporan	50.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasi PMD
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				486.000.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5	Lembaga kemasyarakatan	486.000.000	✓	✓	✓	✓	Kasi Kesra
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum	100	Persen	175.000.000					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				175.000.000					

		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diwilayah Kecamatan	100	Persen	175.000.000		✓	✓	✓	✓	Kasi Tramtib
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	Persen	280.000.000						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang di laksanakan	85	Persen	280.000.000						
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal serta tokoh agama dan tokoh masyarakat diwilayah Kecamatan	1	Laporan	280.000.000		✓	✓	✓	✓	Kasi Kesra
		JUMLAH				56.075.880.699						

BAB IV PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas pekerjaan Umum tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.